

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Legitimasi

Industri berpotensi menjadi penyumbang kerusakan alam karena berbagai bahan kimia yang terkandung dalam bahan baku yang digunakan serta emisi gas yang timbul berpotensi mengotori dan mencemari udara akibat dari aktivitasnya. Oleh sebab itu, pelaporan tanggung jawab lingkungan, termasuk pengungkapan jejak karbon, merupakan salah satu bentuk usaha perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya dalam rangka eksplorasi, pengendalian, dan perlindungan alam serta lingkungan hidup. Pengungkapan emisi karbon akan membantu entitas menciptakan nilai tambah, sehingga memungkinkan mereka menjaga keberlanjutan dalam pengelolaan operasinya.¹

Dowling dan Pfeffer memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai legitimasi suatu organisasi, mereka memperkenalkan teori ini pertama kalinya pada tahun 1975. Teori ini muncul dari paradigma ilmu sosial dan menekankan anggapan bahwa perusahaan harus menjalankan fungsi sosialnya dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana kontribusi perusahaan terhadap masyarakat akan meningkatkan citra perusahaan itu sendiri. Dowling dan Pfeffer menyatakan bahwa operasional perusahaan harus menyesuaikan norma sosial yang memandu kegiatan operasionalnya dengan batasan dan norma sosial yang berlaku di lingkungan perusahaan.²

Intinya, legitimasi adalah teori yang memaknakan hubungan perusahaan dengan publik. Suatu perusahaan dapat mencapai legitimasi jika kegiatannya berbanding dengan batas dan norma yang aktual di khalayak umum. Pada dasarnya, legitimasi dapat bervariasi antar waktu dan tempat. Apabila perusahaan ingin tetap berdiri, maka harus siap beradaptasi dengan perubahan tersebut. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa perusahaan dan masyarakat memiliki kontrak sosial, yang

¹ Dian Yuni Anggraeni, "Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca, Kinerja Lingkungan, Dan Nilai Perusahaan," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 12, no. 2 (2015), hal 192.

² John Dowling dan Jeffrey Pfeffer, "Organizational Legitimacy: Social Values and Organization Behaviour," *Pacific Sociological Review* 18, no. 1 (1975), hal 122.

dipandang sebagai cara untuk membuat harapan masyarakat terhadap bagaimana aktivitas perusahaan semakin jelas³

Menurut perspektif teori legitimasi, ketika suatu perusahaan mengungkapkan informasi terkait sosial dan lingkungannya, perusahaan tersebut mengharapkan agar dapat meraih legitimasi sosial, terutama demi kelangsungan hidup organisasinya. Sebuah legitimasi dipandang sebagai pemahaman yang membuat gerakan yang diambil oleh suatu perusahaan diharapkan sesuai atau konsisten dengan nilai, norma, keyakinan, dan batasan di masyarakat. Legitimasi sosial menurut terori ini, dapat diperoleh suatu perusahaan dengan berupaya melakukan aktivitas mereka dalam batasan dan kebiasaan atau adat yang ada di masyarakat tempat mereka beroperasi.⁴

Banyaknya pemaparan di atas, disimpulkan bahwa berdasarkan teori ini terdapat hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Agar perusahaan mendapatkan legitimasi sosial, perusahaan harus mematuhi norma dan memperhatikan keadaan masyarakat dan lingkungan sekitar. Perusahaan dapat menempuh salah satu langkah untuk mendapatkan kepercayaan publik atau masyarakat adalah dengan melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Setelah mendapatkan legitimasi, perusahaan dapat terus beroperasi.

2. Teori Stakeholder

Sejalan dengan berkembangnya dunia usaha, manajemen secara tersirat berkewajiban penuh bukan hanya kepada pemegang saham belaka, namun kepada para pemangku kepentingan lainnya juga, antara lain kepada kreditor, pemerintah, ahli analis, masyarakat, alam, serta lingkungan perusahaan. Maka dari itu, pemangku kepentingan (*stakeholder*) memiliki kewenangan yang sama dengan para pemegang saham dalam mengakses keterangan berkaitan dengan perusahaan.⁵

³ Septriyawati dan Anisah, “Pengaruh Media Exposure, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.”, hal 105.

⁴ Inten Meutia, Menata Pengungkapan CSR Pada Bank Islam (Pendekatan Teori Kritis) (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), hal 78.

⁵ Evi Grediani, Rahmawati Hanny Yustrianthe, dan Nanik Niandari, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Peran Audit Internal Sebagai Pemoderasi,” Jurnal Ilmiah Akuntansi 5, no. 2 (2020), hal 287.

Teori ini menjelaskan bagaimana bisnis berfungsi atau bekerja dengan baik dan bagaimana hal ini dapat dicapai. Teori ini mencetuskan bahwa bisnis akan bekerja dan adanya kolaborasi dengan pihak lain, dalam hal ini yaitu para pemangku kepentingan untuk memperoleh manfaat dan kepentingan bersama. Menurut teori ini, beroperasinya suatu bisnis bukan hanya untuk mengejar keuntungannya sendiri. Tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemangku kepentingan itu juga. Dengan demikian, *stakeholder* dianggap memiliki kemampuan untuk mengontrol aktivitas perusahaan yang ada, termasuk mendorong perusahaan agar melaksanakan pengungkapan.⁶

Pengungkapan informasi terkait sosial maupun lingkungan dapat digunakan untuk membagikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai kinerja lingkungan suatu perusahaan, khususnya investor atau pemilik. Jika telah tercipta baiknya kinerja lingkungan perusahaan, maka mereka tentu mengungkapkan lebih banyak informasi terkait lingkungannya. Begitu juga sebaliknya pada kinerja lingkungan yang buruk oleh suatu perusahaan. Dalam hal ini, entitas maupun individu yang dapat terpengaruh ataupun mempengaruhi misi perusahaan adalah para pemangku kepentingan atau *stakeholder*.⁷

Terciptanya nilai plus perusahaan dari para pemangku kepentingan menjadi tujuan dari teori *stakeholder*, karena hal tersebut mendukung keberlangsungan suatu perusahaan. Apabila perusahaan tidak fokus pada pemangku kepentingannya, kemungkinan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan. Karenanya, perlunya melakukan pengelolaan pemangku kepentingan yang baik agar tujuan yang hendak dicapai perusahaan mendapatkan dukungan yang lebih memadai. Dalam hal ini, pelaporan terkait lingkungan

⁶ Selsia Putri Anggraini dan Susi Handayani, "Pengaruh Tekanan Stakeholder, Sertifikasi ISO 14001, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 1, no. 1 (2021), hal 155–156.

⁷ Evi Grediani, Rahmawati Hanny Yustrianthe, dan Nanik Niandari...hal 288.

hidup dapat menjauhkan perusahaan dari tindakan yang dapat merugikannya.⁸

3. Carbon Emission Disclosure

1. Pengungkapan Sukarela

Saat ini, terdapat tuntutan bagi perusahaan agar lebih terbuka mengenai perusahaannya. Menurut Nuswandari, pengungkapan adalah publikasi informasi yang terdapat pada laporan tahunan dengan harapan mampu memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya.⁹ Terbagi menjadi dua jenis publikasi informasi suatu perusahaan yang dapat ditemukan dalam laporan tahunannya, diantaranya informasi pengungkapan wajib dan sukarela. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) mengacu pada pengungkapan informasi suatu perusahaan yang harus dilaksanakan sejalan dengan peraturan yang berlaku pada suatu negara. Sementara itu, pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) mengacu pada pelaporan informasi suatu perusahaan yang bersifat sukarela, di luar cakupan pengungkapan wajib.¹⁰ Artinya perusahaan diberikan kebebasan untuk mengungkapkan sukarela pada laporan tahunannya, yang menyebabkan perbedaan besar dalam pengungkapan informasi sukarela antar perusahaan.

Pengungkapan sukarela dapat menjadi cara perusahaan untuk meningkatkan keandalan atau kredibilitas finansialnya, serta dapat membantu investor untuk menangkap strategi bisnis suatu perusahaan. Adanya pengungkapan sukarela ini, manajemen perusahaan mempunyai opsi untuk mempublikasikan informasi akuntansi lain yang relevan guna menginformasikan keputusan bagi individu maupun entitas yang menggunakan laporan tahunan perusahaan. Manajemen yang mengungkapkan informasi sukarela artinya manajemen tersebut mempercayai bahwa pengungkapan ini penting, dan informasi pengungkapan

⁸ Umi Hanifah dan W. Wahyono, "Diskursus Urgensi Carbon Emission Disclosure Pada Perusahaan-Perusahaan Publik Di Indonesia," *Jurnal Penelitian* 12, no. 1 (2018), hal 117.

⁹ Cahyani Nuswandari, "Pengungkapan Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Signalling Theory," *Kajian Akuntansi* 1, no. 1 (2009), hal 50.

¹⁰ Cahyani Nuswandari...hal 53-54.

perusahaan dapat memberikan manfaat bagi investor dan kreditur untuk membaca risiko investasi.¹¹

2. Pengertian Emisi Karbon

Gas alam merupakan sumber energi yang bermula dari fosil tak terbarukan, diantaranya seperti minyak bumi dan batu bara, yang dihasilkan dari tanaman, binatang maupun mikroorganisme yang hidup pada jutaan tahun lalu yang terpendam dalam susunan di dasar laut.¹² Terlepasnya gas rumah kaca ke atmosfer bumi yang di dalamnya terkandung karbon merupakan definisi dari emisi karbon. Terlepasnya karbon ke atmosfer bumi inilah yang disebut emisi karbon atau *carbon emission*. Terjadinya hal tersebut yaitu akibat pembakaran karbon dalam bentuk sederhana maupun senyawa.¹³

Salah satu yang berkontribusi terhadap perubahan iklim yaitu emisi karbon yang melibatkan emisi gas rumah kaca. Artinya adalah banyaknya emisi yang dilepaskan ke udara sehingga menimbulkan emisi gas rumah kaca inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Berbahai macam gas rumah kaca yang diterima pada Protokol Kyoto diantaranya karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O), klorofluorokarbon (CFC), hidrofluorokarbon (HFC_s) dan sulfur heksafluorida (SF₆). Gas rumah kaca utama yang membawa dampak terjadinya pemanasan global yakni CO₂. Seiring berjalannya waktu, terus meningkat baik secara global, regional, nasional dalam suatu negara, maupun lokal dalam suatu wilayah.¹⁴

3. Pengungkapan Emisi Karbon

Pelaporan emisi karbon sebagai bentuk keterbukaan informasi masih bersifat sukarela di Indonesia. Pelaporan tersebut sebagai bentuk keterbukaan informasi yang dapat ditemui pada laporan tahunan suatu perusahaan. Adanya emisi karbon tidak dapat dipisahkan dari operasional suatu

¹¹ Ibnu Sutomo, "Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Pada Laporan Tahunan Perusahaan," 2004, hal 20.

¹² Sutarno, Sumber Daya Energi, Edisi 1. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal 128.

¹³ Umi Hanifah dan W. Wahyono...hal 121.

¹⁴ Bayu Tri Cahya, "Carbon Emission Disclosure: Ditinjau Dari Media Exposure, Kinerja Lingkungan Dan Karakteristik Perusahaan Go Public Berbasis Syariaah Di Indonesia," NIZHAM 5, no. 2 (2016), hal 175.

perusahaan. Situasi ini juga mendorong perusahaan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan sosial dari waktu ke waktu. *Carbon emission disclosure* menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan yang mendukung usaha pemerintah untuk menekan emisi karbon yang akan mengurangi dampak dari emisi karbon yang dihasilkan perusahaan, yaitu terjadinya kerusakan lingkungan.¹⁵

Keterbukaan informasi terkait kegiatan sosial dan lingkungan dikelola sesuai peraturan. Peraturan yang dibentuk oleh IAI sebagaimana tercantum dalam PSAK No. 1 (revisi 2019) paragraf dua belas, yaitu:

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.¹⁶

PSAK di atas secara implisit merekomendasikan agar perusahaan mengungkapkan tanggung jawab lingkungannya. Maka dari itu, pengungkapan emisi karbon menjadi penting karena pemangku kepentingan membutuhkan informasi tersebut. Pemangku kepentingan ingin memahami risiko lingkungan dari kegiatan bisnis perusahaan, dan bagaimana perusahaan melakukan pembangunan berkelanjutan dan kegiatan perlindungan terhadap lingkungan.¹⁷ Perusahaan harus lebih terbuka terhadap seluruh kegiatan perusahaan dan bentuk tanggung jawabnya. Akan menunjukkan sikap transparansi dan akuntabilitas bisnis bagi perusahaan yang bersedia mengungkapkan informasinya secara lengkap.¹⁸

¹⁵ Nur Aisyah Putri, Noto Pamungkas, dan Sri Suryaningsum, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Lingkungan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Terhadap Carbon Emission Disclosure,” *Jurnal Akuntansi Bisnis* 20, no. 2 (2022), hal 186.

¹⁶ Budi Kurniawan dan Yohanes Mardinata Rusli, “Pengaruh Board of Commissioners, Independent Board of Commissioners Dan Profitability,” *Seminar Nasional Akuntansi (Sena) Iii* (2020), hal 149.

¹⁷ Desy Nur Pratiwi, “Implementasi Carbon Emission Disclosure Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2018), hal 103.

¹⁸ Umi Hanifah dan W. Wahyono...hal 123.

Setiap aspek kehidupan manusia di bumi telah dirancang dalam agama Islam, termasuk dalam hubungan manusia dengan Sang Ilahi, hubungan antar manusia, antara manusia dengan binatang, bahkan hubungan manusia dengan alam semesta. Eksistensi manusia hanyalah *khalifah* di muka bumi, sedangkan kepemilikan absolut adalah Allah SWT. Oleh sebab itu, umat manusia bertanggung jawab terhadap seluruh aspek kehidupan, yaitu terhadap diri sendiri, masyarakat, agama, serta lingkungannya. Hal tersebut tidak hanya berlaku dalam menjalankan kehidupan, tetapi juga dalam kegiatan usaha.

Telah diajarkan dalam Islam mengenai prinsip tanggung jawab dalam segala bidang. Kepedulian terhadap lingkungan sosial diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيذِيْقَهُمُ النَّاسِ آيِدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ
يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ

Terjemahannya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka Kembali (ke jalan yang benar)”.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Halim menjelaskan bahwa terdapat keadaan sulit yang terjadi di darat dan laut, akibat tidak turunnya hujan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri, dan menjadi penunjuk serta teguran dari Allah supaya seluruh insan di muka bumi ini dapat memanggul balasan dari ulahnya dan kembali ke jalan yang diridhai Allah.¹⁹

Oleh sebab itu, tingkah laku perusahaan dalam menggerakkan kegiatan komersialnya, tidak boleh merusak lingkungan hidup. Informasi mengenai pengungkapan lingkungan hidup perusahaan sangatlah penting, termasuk pengungkapan emisi karbon. *Carbon emission disclosure* dapat dinilai dengan memberikan 1 poin untuk setiap pengungkapan yang dilakukan perusahaan, dan memberikan

¹⁹ “Surah Ar-Rum Ayat 41-42; Terjemahan Dan Tafsir Al-Qur'an - Pecihitam.Org,” accessed January 15, 2023.

skor 0 bagi perusahaan yang tidak mengungkapkan.²⁰ Terdapat 18 item yang digunakan untuk menilai *carbon emission disclosure*. Kriteria yang diterapkan adalah:

Tabel 2.1
Item Carbon Emission Disclosure

Kategori	Item	Keterangan
Peluang dan Risiko Perubahan Iklim	CC1	Menilai risiko mengenai perubahan iklim dan langkah-langkah yang telah atau akan ditempuh untuk mengatasi risiko-risikonya.
	CC2	Menilai dampak perubahan iklim saat ini dan masa yang akan datang terhadap keuangan, bisnis dan peluang.
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	GHG1	Penjelasan tentang metodologi yang diterapkan untuk menghitung emisi gas rumah kaca (misalnya protokol GRK atau ISO)
	GHG2	Apakah ada verifikasi eksternal terhadap emisi gas rumah kaca, dan jika iya, oleh siapa dan atas dasar apa.
	GHG3	Total emisi gas rumah kaca, diukur dalam ton setara CO _{2-e} .
	GHG4	Pengungkapan cakupan 1, 2 atau gas rumah kaca langsung.
	GHG5	Pengungkapan gas rumah kaca menurut sumbernya (misalnya batubara, listrik, dan sebagainya).
	GHG6	Informasi mengenai gas rumah kaca, dibagi berdasarkan fasilitas atau sektor.

²⁰ Septriyawati dan Anisah, "Pengaruh Media Exposure, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018."

	GHG7	Perbandingan emisi gas rumah kaca tahun ini dengan tahun sebelumnya.
Konsumsi Energi	EC1	Total energi yang dikonsumsi (misalnya terajoule atau petajoule).
	EC2	Hitung energi yang digunakan oleh sumber daya terbarukan.
	EC3	Pengungkapan dipecah berdasarkan jenis, fasilitas, dan industri.
Pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) dan Biaya	RC1	Rincian rencana atau strategi pengurangan emisi gas rumah kaca.
	RC2	Spesifikasi target tahunan dan tingkat target pengurangan emisi gas rumah kaca.
	RC3	Pengurangan emisi dan pengeluaran terkait dengan emisi tersebut, selain penghematan biaya.
	RC4	Biaya emisi di masa depan diperhitungkan dalam rencana belanja modal.
Akuntabilitas Emisi Karbon	AEC1	Menunjukkan tanggung jawab dan Tindakan oleh komite dewan yang berkenaan dengan perubahan iklim.
	AEC1	Menjelaskan mengenai mekanisme dewan direksi untuk menilai kemajuan perusahaan dalam perubahan iklim.

Sumber: Bae Choi dkk., 2013.

Skor satu poin untuk setiap kasus dimana informasi dipublikasikan. Jika tidak, maka skor nol poin. Berikut merupakan rumus yang dapat digunakan untuk menentukan

skor pengungkapan secara keseluruhan berlandaskan kriteria yang dipaparkan di atas:²¹

$$\text{Carbon Emission Disclosure} = \frac{\text{Total item yang diungkapkan}}{\text{Total item keseluruhan}}$$

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan ukuran suatu bisnis dan menggambarkan jumlah aktivitas operasi bisnis tersebut. Semakin besarnya ukuran suatu perusahaan tentu akan diiringi juga oleh besarnya aktivitas bisnisnya. Total aset, volume penjualan, dan kapasitas pasar merupakan beberapa indikator yang dapat menilai ukuran sebuah perusahaan.²² Artinya semakin tinggi total aset dan banyaknya penjualan, maka dapat dikatakan semakin banyak pula perputaran uang dalam perusahaan. Ukuran usaha pada dasarnya dibagi menjadi tiga macam, diantaranya usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil. Besar kecilnya perusahaan biasanya menunjukkan banyaknya aset milik perusahaan, perusahaan besar tentunya memiliki jumlah aset yang besar pula, begitupun sebaliknya.²³

Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengklasifikasikan ukuran usaha menjadi 3 kategori, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mendefinisikan ketiga jenis usaha tersebut sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah suatu usaha produksi dan usaha milik perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi standar usaha mikro menurut Peraturan Pemerintah ini.
- b. Usaha kecil ialah suatu usaha produksi dan mandiri yang dijalankan oleh orang perseorangan atau suatu badan usaha yang bukan anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan lain yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari suatu usaha, baik langsung maupun tidak langsung dari suatu

²¹ Bo Bae Choi, Doowon Lee, dan Jim Psaros, "An Analysis of Australian Company Carbon Emission Disclosures," *Pacific Accounting Review* 25, no. 1 (2013).

²² Rini, Pratama, dan Muslih, "Pengaruh Growth, Firm Size, Profitability, Dan Environmental Performance Terhadap Carbon Emission Disclosure Perusahaan Industri High Profile Di Bursa Efek Indonesia."

²³ Nastiti dan Hardiningsih, "Determinan Pengungkapan Emisi Karbon.", hal 2670.

usaha menengah atau besar yang memenuhi standar usaha kecil menurut Peraturan Pemerintah ini.

- c. Usaha menengah ialah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dikelola oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai atau bagian dari perusahaan baik langsung atau tidak langsung dengan kekayaan bersih atau pendapatan penjualan tahunan.²⁴

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Modal (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 1 M	Maksimal 2 M
Usaha Kecil	> 1 M – 5 M	> 2 M – 15 M
Usaha Menengah	> 5 M – 10 M	> 15 M – 50 M

Sumber: Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021

Pengelompokkan usaha mencerminkan besar kecilnya usaha berdasarkan total aset yang dimilikinya. Dapat ditarik kesimpulan definisi ukuran perusahaan merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk memperkirakan atau menetapkan nilai besar kecilnya atau ruang lingkup usaha, berdasarkan total aset dan pendapatan usaha tersebut. Oleh karena itu, perusahaan juga diimbau untuk menjaga dan melindungi lingkungannya guna menunjang kinerja atau operasional perusahaan, disamping mengelola operasionalnya.²⁵

Teori legitimasi menerangkan bahwa perusahaan dengan skala besar tentu diiringi dengan desakan dari masyarakat yang

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, n.d.

²⁵ Eksi Puspita Rini, Febrial Pratama, dan Muhammad Muslih, "Pengaruh Growth, Firm Size, Profitability, Dan Environmental Performance Terhadap Carbon Emission Disclosure Perusahaan Industri High Profile Di Bursa Efek Indonesia," JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) 5, no. 3 (2021): 1104–1105.

lebih besar juga. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan perusahaan. Dari segi sumber daya, perusahaan besar dinilai mempunyai kapasitas yang cukup untuk mengungkapkan permasalahan lingkungan hidup.²⁶ Keberadaan besarnya sumber daya ini memungkinkan perusahaan untuk merespons secara efektif terhadap permasalahan lingkungan yang semakin meningkat karena sumber daya tersebut memungkinkan para manajer untuk melakukan respon lingkungan yang lebih sesuai. Perhitungan ukuran perusahaan menurut J. alloy Niresh dan T. Velnampy diukur dengan menggunakan rumus:

1. Ln Total Aset

Aset dapat berupa harta maupun sumber daya milik suatu bisnis. Banyaknya aset perusahaan, tentu diiringi dengan terpenuhinya permintaan produk dan baiknya perusahaan tersebut dalam berinvestasi. Sehingga dapat menaikkan pangsa pasar yang diperoleh serta mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan.

2. Ln Total Penjualan

Penjualan menjadi fungsi pemasaran yang amat penting guna mendapatkan keuntungan yang merupakan misi utama perusahaan. Ketika penjualan meningkat, biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dapat diimbangi. Laba yang meningkat mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan.²⁷

Ukuran perusahaan menggambarkan stabil atau tidaknya dalam menjalankan aktivitas ekonomi perusahaan. Berdasarkan rumus di atas, besarnya ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan logaritma natural dari total aset. Total aset digunakan dalam penelitian ini karena nilai dari total aset tersebut biasanya bernilai sangat besar dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya. Selain itu, total aset lebih stabil dan representatif dalam menunjukkan ukuran perusahaan dibandingkan kapitalisasi pasar yang sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran.

²⁶ Yohanes Mario Pratama, "Analisis Determinan Pengungkapan Emisi Karbon Di Indonesia," *Modus* 33, no. 2 (2021), hal 126.

²⁷ J. Aloy Niresh dan T. Velnampy, "Firm Size and Profitability: A Study of Listed Manufacturing Firms Ed Manufacturing Firms in Sri Lanka," *International Journal of Business and Management* 9, no. 4 (2014), hal 60.

5. Kepemilikan Institusional

Suatu perusahaan dapat dimiliki oleh suatu organisasi, institusi, maupun kepemilikan individu. Struktur pemegang saham dianggap sebagai faktor yang mewakili *carbon emission disclosure* karena mewakili posisi permodalan suatu perusahaan. Diterangkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa setiap penanam modal memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan, penanam modal yang bergerak pada bidang sumber daya alam tak terbarukan harus mengalokasikan anggaran secara berangsur-angsur untuk memulihkan situs yang memenuhi kriteria kelayakan lingkungan hidup, implementasinya dirancang oleh peraturan perundang-undangan.²⁸

Berdasarkan teori *stakeholder*, investor institusional adalah salah satu pemangku kepentingan dari suatu perusahaan karena pemangku kepentingan tertarik dengan keberadaan jangka panjang atau kesinambungan perusahaan. Pemahaman investor institusi berkenaan dengan isu perubahan iklim mampu menambah mutu pemegang saham dan meningkatkan renungan manajer terhadap pengungkapan lingkungan.²⁹ Institusi akan lebih memantau perusahaan tempat institusi tersebut berinvestasi karena institusi harus memastikan investasinya tidak merugikan. Oleh karena itu, kepemilikan institusi menjadi penting dalam pengelolaan pengawasan karena akan mendesak pengawasan yang lebih optimal.³⁰

Kepemilikan institusional menurut Nuraina yaitu persentase saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau organisasi, baik berupa perusahaan asuransi, dana pension, atau korporasi lainnya. Definisi ini menjelaskan kondisi di mana suatu organisasi memiliki saham di suatu perusahaan. Organisasi-organisasi tersebut adalah instansi pemerintah,

²⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, n.d.

²⁹ I Dewa Gede Ngurah Eka Chandra Pramuditya dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, "Dampak Mekanisme Good Corporate Governance Pada Carbon Emission Disclosure," E-Jurnal Akuntansi 30, no. 12 (2020), hal 3054.

³⁰ Dwi Sukirni, "Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden Dan Kebijakan Hutang Analisis Terhadap Nilai Perusahaan," Accounting Analysis Journal 1, no. 2 (2012), hal 4.

organisasi swasta, dan badan asing, misalnya perusahaan asuransi, bank, dana investasi, dan organisasi atau badan lain.³¹

Jadi, kesimpulannya bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi saham milik suatu institusi yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memantau serta mengendalikan operasional perusahaan. Tingginya tingkat kepemilikan institusional akan menciptakan pengendalian yang dilakukan investor institusi menjadi lebih ketat, sehingga mampu mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam pengelolaan usaha. Tingginya kepemilikan institusional akan mendorong perusahaan untuk melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukannya, termasuk pengungkapan terkait lingkungan hidup.³²

Berlandaskan paparan di atas, berikut ialah rumus yang dapat diterapkan untuk menaksir perbandingan kepemilikan institusional:³³

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

6. Ukuran Dewan Direksi

Perusahaan memerlukan pengurus perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Pengurus perusahaan tersebut disebut direksi. Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan yang mempunyai peranan sangat penting. Direksi bertanggung jawab dalam mengurus perusahaan, memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan ketentuan atau peraturan internal perusahaan maupun peraturan lain di luar perusahaan. Direksi diharuskan memiliki penilaian atau pertimbangan mengenai tindakan apa yang akan dilakukannya demi kepentingan perusahaan.³⁴

³¹ Elva Nuraina, “Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang Dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei),” *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 4, no. 1 (2012), hal 16.

³² Putri, Pamungkas, dan Suryaningsum, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Lingkungan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Terhadap Carbon Emission Disclosure.”, hal 186.

³³ Adibah Mufidah Hariswan, Emrinaldi DP Nur, dan Nanda Fito Mela, “Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan Pertambangan Di Indonesia,” *Jurnal Al-Iqtishad Edisi* 18, no. 1 (2022), hal 29.

³⁴ Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komsaris, Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, ed. Sarkawi (Malang: UB Press, 2011), hal 92.

Pada kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa direksi merupakan instrumen suatu badan usaha yang memiliki otoritas dan berkewajiban sepenuhnya dalam mengelola perusahaan untuk kebutuhan perseroan, searah dengan tujuan perseroan dan sesuai dengan ketentuan kaidah mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa merupakan tanggung jawab direksi untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan memenuhi peraturan yang berlaku. Dewan juga bertanggung jawab untuk mencapai legitimasi di kalangan pemangku kepentingan dan masyarakat.³⁵

Adapun Fungsi, wewenang serta tanggung jawab direksi yaitu mengarahkan jalannya perusahaan sehari-hari berdasarkan pada kebijakan-kebijakan strategis yang telah disepakati para pihak, guna mencapai tujuan operasional yang telah diputuskan pada saat rapat umum pemegang saham dengan mengambil risiko dan menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya operasional suatu perusahaan, sangat terpaut dengan kepengurusan direksi.³⁶

Pengungkapan emisi karbon tidak terlepas dari peran anggota dewan direksi perusahaan. Menurut UU No. 40 Tahun 2007, direktur mempunyai kedaulatan dan tanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan perseroan guna melindungi kebutuhan badan usaha, serta berperan sebagai penanggung jawab perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, menurut peraturan.³⁷ Menurut Arifah dan Haryono, banyaknya dewan direksi yang dimiliki perusahaan akan memiliki kecenderungan lebih kuat dalam mengatasi permasalahan lingkungan, perusahaan. Jumlah anggota dewan menunjukkan kemampuan perseroan dalam mengambil langkah menangani atau mencegah kerusakan lingkungan hidup dan menyampaikan informasi terkait emisi karbon.³⁸

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017*, 2017.

³⁶ Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan: Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi* (Lembaga Penelitian dan Penelitian Ilmiah Aqli, 2018), hal 11.

³⁷ Yohanes Mario Pratama...hal 125.

³⁸ Nur Arifah dan Slamet Haryono, "Analisis Determinan Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan Indonesia Dan Malaysia Periode 2013-2018," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 7, no. 1 (2021), hal 8.

Menurut teori legitimasi, manajemen perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih legitimasi dari seluruh *stakeholders*. Perolehan legitimasi tersebut menjadi tanggung jawab dari dewan direksi, sebagai tingkat manajemen tertinggi. Banyaknya direksi yang dimiliki suatu perusahaan, dapat menunjukkan kuatnya tata kelola atau manajemen perusahaan tersebut, karena keputusan yang akan diambil oleh direksi akan mempertimbangkan pandangan dari anggota.³⁹ Ukuran dewan direksi dapat dinilai dari banyaknya dewan direksi yang dimiliki perusahaan pada suatu periode waktu.⁴⁰ Ukuran Dewan Direksi = Total dewan direksi yang dimiliki entitas per tahun

7. Kinerja Keuangan

Terdapat dua kategori kinerja, yaitu kinerja operasional dan kinerja keuangan.⁴¹ Istilah kinerja atau *performance* pada suatu perusahaan dapat dikaitkan dengan kondisi keuangannya. Pada umumnya, untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan akan melihat laporan keuangannya, disamping melihat data nonkeuangan yang sifatnya sebagai penunjang informasi kinerja berguna dalam memprediksi kemampuan menciptakan arus kas dari sumber keuangan perusahaan yang tersedia. Kinerja keuangan dapat dipahami sebagai suatu hasil kinerja eksekutif perusahaan dalam menjalankan kewajiban yang diberikan berkaitan dengan pengelolaan finansial perusahaan. Selain itu juga menginformasikan keadaan atau situasi finansial perusahaan yang dapat diperhatikan dalam laporan keuangannya.⁴²

Kinerja keuangan merupakan analisis untuk memahami seberapa efektif dan akurat suatu perusahaan mengendalikan dan memanfaatkan peraturan pelaksanaan kinerja keuangan dengan baik dan benar, serta menghasilkan keuntungan. Kinerja keuangan ini akan diperhatikan oleh investor, guna melihat

³⁹ Aditya Dharmawan Krisna dan Novrys Suhardianto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 18, no. 2 (2016), hal 121.

⁴⁰ Yohanes Mario Pratama...hal 129.

⁴¹ Koשמאן A. Sobandi and Sobarsa Kosasih, *Manajemen Operasi Bagian Kedua* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).

⁴² Chen Kelvin, Fransiskus E. Daromes, dan Suwandi Ng, “Pengungkapan Emisi Karbon Sebagai Mekanisme Peningkatan Kinerja Untuk Menciptakan Nilai Perusahaan,” *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 6, no. 1 (2017), hal 4.

bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Kinerja keuangan dapat juga menjadi sinyal bagi pemangku kepentingan untuk melihat peluang perusahaan di masa depan. Semakin baiknya kondisi keuangan perusahaan, maka terdapat kemungkinan besar perusahaan tersebut untuk mengungkapkan informasi terkait lingkungannya. Karena pengungkapan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga perusahaan yang sehat secara finansial tentu memiliki potensi untuk dapat mengungkapkan emisi karbonnya secara lebih rinci.⁴³

Kapabilitas kinerja keuangan mencakup beragam tindakan perusahaan yang dianggap memiliki kontribusi terhadap usaha pengurangan emisi, hal ini mengenai emisi karbon. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengganti mesin yang tidak berbahaya bagi lingkungan, atau dapat melakukan inisiatif lain yang menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan, misalnya penanaman pohon untuk penyerapan. Perusahaan yang mengungkapkan emisi karbonnya diharapkan mendapatkan legitimasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan, dan mampu menjaga keberlanjutan melalui kinerja keuangan perusahaan.⁴⁴

Analisis keuangan dapat menjadi acuan untuk menilai suatu pencapaian dan kinerja keuangan perusahaan, khususnya rasio yang dapat dihubungkan data satu dengan data keuangan lainnya. Menganalisis berbagai rasio dapat memperoleh prediksi atau wawasan yang lebih luas terkait situasi dan kinerja perusahaan. Penggunaan rasio sebagai alat analisis mampu memberikan gambaran mengenai keadaan finansial suatu entitas bisnis.⁴⁵ Akan diketahui terjadinya peningkatan atau penurunan kondisi keuangan jika membandingkan hasil perhitungan rasio perusahaan selama rentang waktu tertentu.

Kinerja keuangan dapat ditaksir dengan memanfaatkan berbagai macam jenis rasio, yakni; (a) Rasio Likuiditas, yang dapat dapat dihitung menggunakan rasio cepat (*quick ratio*),

⁴³ Dewi Fortuna Nur Rohmah dan Nazmel Nazir, “Pengaruh Kinerja Keuangan, Kinerja Lingkungan, Sistem Manajemen Lingkungan, Kepemilikan Manajerial Dan Reputasi Kap Terhadap Carbon Emission Disclosure,” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 2, no. 2 (2022), hal 753.

⁴⁴ Meliza Andriani, “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Akuntansi Karbon (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015)” (2015), hal 9-10.

⁴⁵ Slamet Heri Winarno, “Analisis NPM, ROA, Dan ROE Dalam Mengukur Kinerja Keuangan,” *Jurnal STEI Ekonomi* 28, no. 02 (2019), hal 259.

rasio lancar (*current ration*) dan rasio kas (*cash ratio*); (b) Rasio Solvabilitas, yang dapat dihitung menggunakan rasio hutang terhadap aset (*debt to assets ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*); (c) Rasio Profitabilitas, yang dapat dihitung menggunakan rasio margin laba kotor, (*gross profit margin*), rasio margin laba bersih (*net profit margin*), rasio pengembalian atas aset (*return on assets*) dan rasio atas ekuitas (*return on equity*); (d) Rasio Aktivitas, yang dapat dihitung dengan rasio perputaran persediaan (*inventory turnover*), rasio perputaran aset tetap (*fixed assets turnover*) dan rasio perputaran aset (*total assets turnover*); (e) Rasio Pertumbuhan, yang dapat dihitung dengan rasio kenaikan penjualan (*sales growth*) dan rasio kenaikan laba bersih (*net income growth*).⁴⁶

8. Kinerja Operasional

Kinerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap entitas maupun individu yang hendak meraih tujuan yang telah dirancang. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kinerja berarti mencapai sesuatu yang hendak diraih, menunjukkan keberhasilan dan kecakapan bekerja. Apabila sebuah tujuan berhasil dicapai, maka dapat dikatakan kinerja tersebut baik. Terdapat dua aspek penting dalam penilaian sebuah kinerja, yaitu efisiensi dan efektivitas dari kegiatan untuk menggapai sebuah misi yang telah ditentukan oleh perusahaan.⁴⁷

Perusahaan ialah bentuk entitas yang di dalamnya mencakup rangkaian fungsi operasional jasa yang bekerja secara sistematis untuk menggapai suatu tujuan. Untuk menggapai tujuan perusahaan tersebut, perlu adanya kolaborasi yang sistematis oleh para pemangku kepentingan agar tercapai kinerja yang optimal. Sebab kinerja dapat menjadi cerminan atau ekspresi dari keseluruhan keadaan kemampuan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, maka kegiatan operasional merupakan hasil pencapaian yang dipengaruhi oleh aktivitas operasi perusahaan dalam mengendalikan dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya.⁴⁸

Kemampuan perusahaan untuk mengelola operasinya yang bertujuan memperoleh laba di waktu yang akan datang

⁴⁶ Meilinda Eka Rusti'ani dan Natalia Titik Wiyani, "Rasio Keuangan Sebagai Indikator Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan Semen," *Akuntansi* 17, no. 2 (2017), hal 128-129.

⁴⁷ Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.

⁴⁸ Husaeri Priatna, "Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Rasio Profitabilitas," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 7, no. 2 (2016), hal 3.

merupakan definisi dari kinerja operasional. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka kemungkinan besar juga tingkat pelaporan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Perusahaan mencoba menunjukkan bahwa keuntungan akan diikuti oleh kegiatan yang memulihkan kondisi lingkungan dengan mengurangi emisi gas.⁴⁹

Selain menjalankan operasionalnya, perusahaan juga harus menjaga lingkungan untuk menunjang kinerjanya. Menurut perspektif teori legitimasi, sebuah perusahaan harus berupaya meraih legitimasi dari pemangku kepentingan dengan cara memperlihatkan kepeduliannya terhadap lingkungan sosial perusahaan atas aktivitas perolehan labanya.⁵⁰ Jika terdapat tanda-tanda operasional perusahaan tidak memenuhi standar internal maupun eksternal perusahaan yang mengakibatkan keburukan pada masyarakat dan lingkungan, maka publik akan bereaksi. Opini publik akan menjadikan tekanan pada dunia usaha terkait dengan kegiatan operasional dan berbagai kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan.⁵¹

Pengukuran kinerja operasional perusahaan salah satunya dapat dilaksanakan dengan menerapkan rasio profitabilitas. Rasio ini merupakan rasio yang menaksir kecakapan suatu perusahaan dalam menghasilkan profit dalam jangka waktu tertentu. Beberapa rasio yang dipergunakan untuk menaksir profitabilitas suatu perusahaan yakni rasio margin laba kotor (*gross profit margin*), rasio margin laba bersih (*net profit margin*), rasio pengembalian atas aset (*return on assets*) dan rasio pengembalian atas ekuitas (*return on equity*).⁵²

B. Penelitian Terdahulu

Sebagian penelitian sebelumnya terkait *carbon emission disclosure* dan item terkait lainnya adalah:

⁴⁹ Aditya Dharmawan Krisna dan Novrys Suhardianto...hal 120.

⁵⁰ Hari Suryono dan Andri Prastiwi, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance(Cg) Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability eport (SR) (Studi Pada Perusahaan – Perusahaan Yang Listed (Go-Public) Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007 - 2009)," Simposium Nasional akuntansi XIV Aceh 2011 (2011), hal 4.

⁵¹ Irwhantoko, "Carbon Emission Disclosure: Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia," 2016, hal 31.

⁵² Winarno, "Analisis NPM, ROA, Dan ROE Dalam Mengukur Kinerja Keuangan.," hal 257-258.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Aulia Nastiti dan Pancawati Hardiningsih (2022) ⁵³	Determinan Pengungkapan Emisi Karbon	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan, media, dan profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Pada saat yang sama, <i>leverage</i> tidak memiliki dampak positif terhadap pengungkapan emisi karbon dan tipe industri tidak memiliki dampak negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.
2	Adi Wiratno dan Fatkhudin Muaziz (2020) ⁵⁴	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>leverage</i> mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
3	Adibah Mufidah Hariswan,	Pengungkapan Emisi Karbon	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa

⁵³ Nastiti dan Hardiningsih.

⁵⁴ Wiratno dan Muaziz.

	Emrinaldi Nur DP, dan Nanda Fito Mela (2022) ⁵⁵	Perusahaan Pertambangan di Indonesia	ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan perempuan di dewan direksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. <i>Leverage</i> dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
4	Nur Aisyah Putri, Noto Pamungkas, dan Sri Suryaningsum (2022) ⁵⁶	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Lingkungan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i>	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kinerja lingkungan, dan pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
5	Yohanes Mario Pratama (2021) ⁵⁷	Analisis Determinan Pengungkapan Emisi Karbon di Indonesia	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan ukuran Wanita dalam anggota dewan,

⁵⁵ Hariswan, Nur, dan Mela.

⁵⁶ Putri, Pamungkas, dan Suryaningsum.

⁵⁷ Pratama.

			ukuran dewan direksi dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon,
6	Merve Kilic Karamahmutoglu dan Cemil Kuzey (2018) ⁵⁸	<i>The Effect of Corporate Governance on Carbon Emission Disclosure: Evidence from Turkey</i>	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa <i>board diversity</i> (keberagaman dewan) dan <i>board committees</i> (dewan komite) mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . Sedangkan <i>board size</i> (ukuran dewan) dan <i>board composition</i> (komposisi dewan) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
7	Cholida dan Warsito Kawedar (2020) ⁵⁹	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Kinerja Operasional, Biaya Ekuitas dalam Pengungkapan Emisi Karbon untuk Menciptakan Nilai Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan dan kinerja operasional mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon dan nilai perusahaan. Sedangkan biaya ekuitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon dan

⁵⁸ Kılıç dan Kuzey.

⁵⁹ Cholida. Kawendar.

			berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Serta pengungkapan emisi karbon berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
8	Rendi Wibowo, Saring Suherno dan Yunia Amelia (2022) ⁶⁰	<i>Analysis of Factors Affecting Carbon Emission Disclosure in Indonesia</i>	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa <i>size of company</i> , <i>profitability</i> , dan <i>managerial ownership</i> mempunyai pengaruh positif terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . Sedangkan <i>environmental performance</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
9	Ni Putu Eka Dewayani dan Ni Made Dwi Ratnadi (2021) ⁶¹	Pengaruh Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Pengungkapan Emisi Karbon	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kinerja lingkungan dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

⁶⁰ Wibowo dkk.

⁶¹ Eka Dewayani dan Ratnadi.

10	Suci Septriyawati dan Nur Anisah (2019) ⁶²	Pengaruh Media <i>Exposure</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa media <i>exposure</i> mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
11	Rezka Krisna Wardhani dan warsito Kawedar (2019) ⁶³	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon dan Reaksi Saham pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa likuiditas, kinerja keuangan, dan reputasi KAP mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sementara likuiditas, kinerja keuangan, dan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap reaksi saham
12	Ischazilatul Amaliyah dan Badingatus Solikhah (2019) ⁶⁴	Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Karakteristik <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kinerja lingkungan, kepemilikan manajerial, komisisaris independen, dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap

⁶² Septriyawati dan Anisah.”

⁶³ Wardhani dan Kawedar.

⁶⁴ Amaliyah dan Solikhah.

			pengungkapan emisi karbon. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.
13	Shakina Dwi Ariesta Putri dan Muhammad Nuryatno Amin (2022) ⁶⁵	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas Terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i>	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . Sedangkan <i>leverage</i> dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
14	Amrie Firmansyah, Wahyudi Febrian, dan Pramuji Handa Jadi (2021) ⁶⁶	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Ukuran perusahaan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon di Indonesia	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tata kelola perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.
15	Dewi Fortuna Nur Rohmah dan Nazmel Nazir (2022) ⁶⁷	Pengaruh Kinerja Keuangan, Kinerja Lingkungan, Sistem Manajemen Lingkungan, Kepemilikan Manajerial dan	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kinerja lingkungan, kinerja lingkungan, sistem manajemen lingkungan, dan reputasi KAP berpengaruh positif dan signifikan

⁶⁵ Shakina Dwi Ariesta Putri dan Muhammad Nuryatno Amin.

⁶⁶ Amrie Firmansyah dkk.

⁶⁷ Dewi Fortuna Nur Rohmah dan Nazmel Nazir.

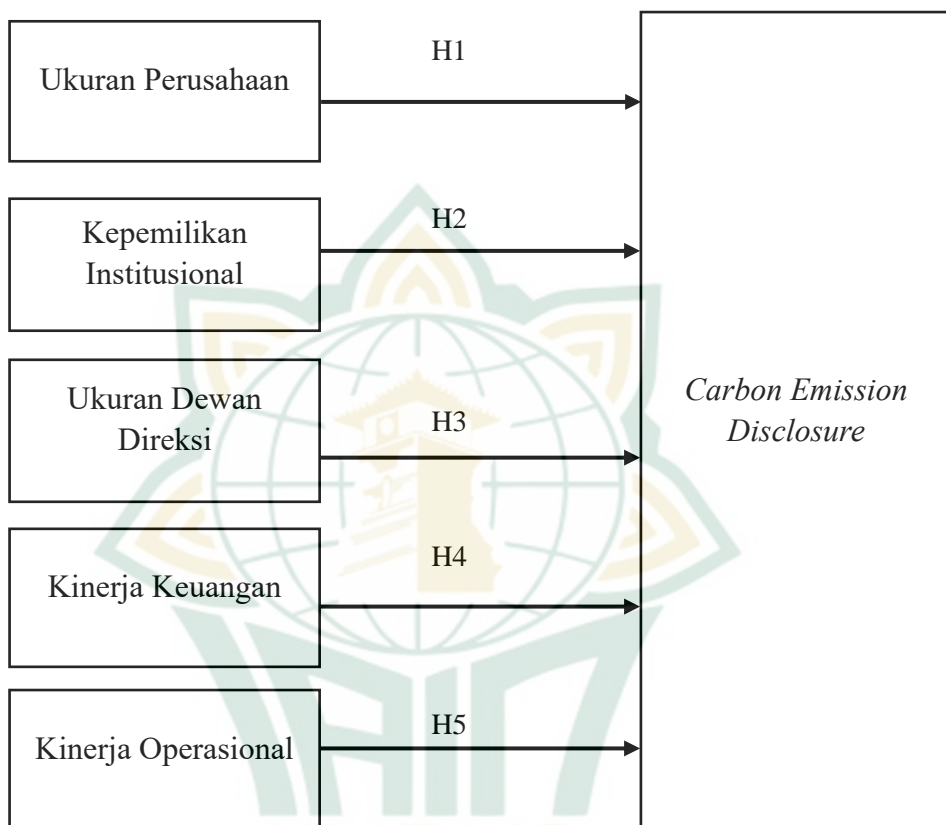
		Reputasi KAP Terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i>	terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . Sedangkan kinerja keuangan dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
--	--	---	---

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yaitu suatu konsep mengenai bagaimana suatu teori berkaitan dengan elemen yang telah diidentifikasi sebagai isu krusial.⁶⁸ Implementasi *carbon emission disclosure* menjadi hal yang penting dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Terutama bagi perusahaan-perusahaan yang intensif menghasilkan emisi karbon. Kajian ini menetapkan enam variabel, yakni variabel bebas terdiri dari ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, kinerja keuangan, dan kinerja operasional, sementara variabel terikatnya yakni *carbon emission disclosure*. Berdasarkan uraian tersebut, struktur penelitian disajikan sebagai berikut:

⁶⁸ Tegor dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Meida Rachmawati (Jakarta: Lakisha, 2020), hal 40.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, kinerja keuangan dan kinerja operasional mempengaruhi *carbon emission disclosure*. Hal tersebut konsisten dengan teori yang dijelaskan sebelumnya, bahwa *carbon emission disclosure* dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, kinerja keuangan dan kinerja operasional.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang hubungan antar variabel yang sifatnya sementara atau hanya dugaan dan tetap lemah, arti lemah yaitu kaitannya dengan pernyataan yang dibentuk dalam hipotesis benar atau tidaknya teori tersebut, bukan

hubungan antar variabel.⁶⁹ Hipotesis memberikan asumsi atau jawaban sementara yang kemungkinan benar, namun bisa juga tidak benar. Hipotesis disebut suatu dugaan sementara, karena bukan sekedar hipotesis melainkan dugaan berdasarkan teori atau hasil penelitian terdahulu yang relevan. Karena masih sekedar dugaan, hipotesis ini dapat diterima, atau mungkin ditolak.⁷⁰

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Carbon Emission Disclosure

Banyaknya aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan biasanya menggambarkan ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan dengan aset besar memberikan tanda bahwa mereka melakukan kegiatan operasional yang lebih banyak, tujuannya yaitu hendak memperoleh margin yang lebih tinggi, sehingga lebih besar kemungkinannya untuk mengungkapkan jejak karbon perusahaan. Hal tersebut menunjukkan adanya kepedulian yang lebih terhadap lingkungan harus dimiliki oleh perusahaan berskala besar.⁷¹ Dijelaskan dalam teori legitimasi bahwa ketika ukuran perusahaan bertambah besar, maka bertambah pula besarnya tekanan yang diperoleh perusahaan dari publik, tidak terkecuali dalam permasalahan tanggung jawab lingkungannya. Besarnya perusahaan juga terdapat kemungkinan besar bahwa perusahaan mempunyai kapasitas sumber daya yang memadai untuk merespon secara efektif mengenai permasalahan lingkungan.

Menurut hasil penelitian Laras Arum Sekarini dan Iwan Setiadi mengemukakan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki dampak positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.⁷² Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ni Putu Eka Dewayani dan Ni Made Dwi Ratnadi

⁶⁹ Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hal 47.

⁷⁰ Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian Untuk Menulis Karya Ilmiah*, ed. Andri Kurniawan, Lastry Forsia, and Hery Nuraini (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), hal 47.

⁷¹ Aulia Nastiti dan Pancawati Hardiningsih, "Determinan Pengungkapan Emisi Karbon," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 04, no. 01 (2021), hal 2670.

⁷² Laras Arum Sekarini dan Iwan Setiadi, "Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)," *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 19, no. 2 (2022), hal 209.

yang memaparkan variabel ukuran perusahaan berdampak positif terhadap pengungkapan emisi karbon.⁷³ Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Seluruh saham beredar suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi tertentu merupakan definisi dari kepemilikan institusional. Hubungan perusahaan dengan seluruh pemangku keentingannya telah dijelaskan dalam teori *stakeholder*, sehingga mengharuskan manajemen berusaha bersikap terbuka dengan seluruh kegiatan perusahaan. Adanya kepemilikan institusional memungkinkan pengendalian manajemen yang lebih optimal, dan kuatnya desakan untuk menunjukkan pertanggungjawabannya terhadap sosial lingkungan. Tingginya kepemilikan saham institusi, memungkinkan meningkatnya kontrol atau pengawasan suatu perusahaan, akibatnya perusahaan akan cenderung mengungkap seluruh kegiatannya, pada akhirnya dapat meningkatkan citra positif di kalangan pemangku kepentingan.⁷⁴

Menurut hasil penelitian Adibah Mufidah Hariswan, dkk mengemukakan bahwa variabel kepemilikan institusional terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.⁷⁵ Sejalan dengan hasil observasi yang dilaksanakan Desy Nur Pratiwi menyatakan hasil bahwa kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon terbukti berdampak positif.⁷⁶ Berdasarkan penjelasan di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

⁷³ Ni Putu Eka Dewayani dan Ni Made Dwi Ratnadi, "Pengaruh Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Pengungkapan Emisi Karbon," E-Jurnal Akuntansi 31, no. 4 (2021), hal 846.

⁷⁴ Ischazilatul Amaliyah dan Badingatus Solikhah, "Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Karakteristik Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon," Journal of Economic, Management, Accounting and Technology 2, no. 2 (2019), hal 133.

⁷⁵ Adibah Mufidah Hariswan, Emrinaldi DP Nur, dan Nanda Fito Mela, "Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan Pertambangan Di Indonesia," Jurnal Al-Iqtishad Edisi 18, no. 1 (2022), hal 35.

⁷⁶ Desy Nur Pratiwi...hal 110.

3. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Dewan direksi menjadi elemen manajemen terpenting yang bertanggungjawab untuk memastikan memperoleh legitimasi dari pemangku kepentingan perusahaannya. Agar mendapatkan legitimasi ini, suatu perusahaan hendaknya melaksanakan kewajiban lingkungan sosialnya, terutama dengan mempublikasikan informasi tentang *carbon emission disclosure*. Bagaimana tata kelola dalam suatu perusahaan mampu digambarkan dengan melihat ukuran dewan direksinya, karena dewan dalam mengambil keputusan tentu akan mempertimbangkan opini dari para anggotanya. Besarnya ukuran dewan direksi, maka besar pula kemampuan mereka dalam mengelola perusahaannya, dan oleh karena itu juga semakin baik kemampuannya dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan.⁷⁷

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Daniel T.H. Manurung, R. Wedi Rusmawan Kusumah, dan Bachtiar Asikin mengemukakan hasil bahwa ukuran dewan direksi terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.⁷⁸ Berdasarkan penjelasan di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

4. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Menurut teori *stakeholder*, setiap bisnis tentu mempunyai banyak pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini memicu banyak pendapat atau pemikiran mengenai apa saja tindakan yang sebaiknya dilakukan perusahaan agar dapat menjalankan aktivitasnya dengan sukses. Bisnis harus melalui banyak kontrak dan negosiasi yang berbeda dengan pemangku kepentingan untuk mempertahankan eksistensinya, karena bisnis sangat berkaitan dengan kontrak antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan yang telah disepakati. ROE digunakan dalam observasi ini sebagai alat ukur kinerja keuangan suatu

⁷⁷ Daniel T.H. Manurung dkk., "Peran Corporate Governance Dan Komite Lingkungan Dalam Pengungkapan Gas Rumah Kaca," 4 th International Conference On Business, Economics and Social Science, no. August (2017), hal 13.

⁷⁸ Daniel T.H. Manurung dkk...hal 20.

perusahaan. Kondisi finansial perusahaan yang sehat, tentu mampu mempersiapkan tambahan sumber daya manusia dan keuangan yang diinginkan guna mengungkapkan jejak karbon perusahaan yang lebih baik guna melawan desakan dari luar.⁷⁹

Menurut penelitian Chen Kelvin, Fransiskus E. Daromes, dan Suwandi mengemukakan hasil bahwa kinerja keuangan mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.⁸⁰ Hasil observasi tersebut searah dengan observasi yang dilaksanakan Cholida dan Warsito menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan berdampak positif terhadap pengungkapan emisi karbon.⁸¹ Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis berikut:

H4 : Kinerja keuangan berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

5. Pengaruh Kinerja Operasional Terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Salah satu dari banyaknya jenis rasio profitabilitas yakni ROA, rasio tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan melalui penggunaan jumlah aset yang dimilikinya. Tingginya ROA perusahaan, memungkinkan mereka mengungkapkan informasi lingkungan untuk mengirimkan sinyal bahwa mereka berhasil dalam menanggapi tekanan lingkungan dan dengan cepat menyelesaikan masalah lingkungan, hal tersebut tentu perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari *stakeholder* yang mana sesuai dengan adanya teori legitimasi. Pengungkapan kesadaran lingkungan perusahaan termasuk strategi perusahaan, tata kelola perusahaan, konsumsi energi dan intensitas gas rumah kaca, terkait perubahan iklim, dampak dan risiko serta kinerjanya terhadap sasaran penurunan emisi karbon.⁸²

Menurut penelitian Cholida dan Warsito Kawendar memaparkan hasil bahwa kinerja operasional mempunyai

⁷⁹ Wiratno dan Muaziz, "Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon Di Indonesia", hal 33.

⁸⁰ Chen Kelvin, Fransiskus E. Daromes, dan Suwandi Ng...hal 14.

⁸¹ Warsito. Cholida. Kawendar, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Kinerja Operasional, Biaya Ekuitas Dalam Pengungkapan Emisi Karbon Untuk Menciptakan Nilai Perusahaan," Diponegoro Journal of Accounting 9, no. 2 (2020), hal 7.

⁸² Warsito. Cholida. Kawendar...hal 3.

dampak positif terhadap pengungkapan emisi karbon.⁸³ Berlandaskan penjelasan di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Kinerja operasional berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.



⁸³ Warsito. Cholida. Kawendar... hal 8.